



PEMERINTAH PROVINSI  
KALIMANTAN TIMUR

# 2025

# LAPORAN MONITORING

## Capaian Kinerja Triwulan I

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

## KATA PENGANTAR

Terselenggaranya Good Governance dalam penyelenggaraan pemerintahan merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan negara. Untuk hal ini diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Guna memenuhi hal tersebut, maka sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan dan Pelaporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi dan Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur telah menyusun Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025.

Laporan Monitoring Capaian Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah Triwulan I Tahun 2025 ini dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang telah dilaksanakan.

Selain berperan sebagai alat kendali, alat penilaian kualitas kinerja dan alat pendorong terwujudnya Good Governance dalam perspektif yang lebih luas, Laporan Monitoring Capaian Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur Triwulan I Tahun 2025 juga berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kinerja kepada Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur serta kepada masyarakat/publik.

Akhirnya dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, penyusunan Laporan Monitoring Capaian Kinerja Instansi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur Triwulan I Tahun 2025 dapat diselesaikan. Kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan Laporan Monitoring Capaian Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Provinsi Kalimantan Timur ini kami ucapkan terima kasih, semoga dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang memerlukannya.

Samarinda, 03 April 2025

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Provinsi Kalimantan Timur



**Drs. Sufian Agus, M.Si**  
Pembina Utama Muda IV/c  
NIP. 196602041988031016

## DAFTAR ISI

|  |     |
|--|-----|
| KATA PENGANTAR .....                                 | i   |
| DAFTAR ISI .....                                     | iii |
| DAFTAR TABEL .....                                   | iv  |
| BAB I AKUNTABILITAS KINERJA                          |     |
| A. Pengukuran Kinerja Triwulan I Tahun 2025 .....    | 1   |
| B. Realisasi Anggaran .....                          | 9   |
| BAB II PERMASALAHAN, REKOMENDASI DAN TINDAK LANJUT   |     |
| A. Permasalahan, Rekomendasi dan Tindak lanjut ..... | 14  |
| BAB III PENUTUP .....                                | 17  |
| LAMPIRAN   |     |

## DAFTAR TABEL

|           |   |    |
|-----------|---|----|
| Table 1.1 | Perjanjian Kinerja .....  | 1  |
| Table 1.2 | Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025.....  | 2  |
| Table 1.3 | Data Potensi Konflik Ipoleksosbud Triwulan I Tahun 2025 .....                     | 5  |
| Table 1.4 | Realisasi Anggaran sesuai dengan Perjanjian Kinerja Triwulan I<br>Tahun 2025..... | 9  |
| Table 1.5 | Realisasi Anggaran per Program dan Kegiatan pada Triwulan I<br>Tahun 2025.....    | 10 |
| Table 2.1 | Permasalahan, Rekomendasi dan Tindak Lanjut.....                                  | 14 |

## BAB I

### AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. PENGUKURAN KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2025

Akuntabilitas Kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, Badan Hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan Misi Organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima laporan akuntabilitas.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur. Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada masukan, keluaran, dan hasil.

Dari pengukuran kinerja akan dapat dilakukan penilaian proses penyusunan Kebijakan/Program/Kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan.

Adapun Perjanjaian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur yang telah ditetapkan untuk tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1  
Perjanjian Kinerja Tahun 2025

| VISI  | MISI  | TUJUAN   | SASARAN  | INDIKATOR SASARAN                            | KON DISI AWA L | TARGET KINERJA THN 2025 | TARGET KERJA TRIWULAN |       |       |       |
|---|---|--|--|--|----------------|-------------------------|-----------------------|-------|-------|-------|
|   |   |  |  |  |                |                         | I                     | II    | III   | IV    |
| 1   | 2   | 3  | 4  | 5  | 6              | 7                       | 8                     | 9     | 10    | 11    |
| Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong | 1.Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia; 2.Struktur Ekonomi yang Produktif, Merata dan Berdaya Saing; 3.Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan; 4.Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan ; 5.Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa; 6.Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya; 7.Pelindungan Bagi Segenap Bangsa dan | Terwujudnya masyarakat Kalimantan Timur yang demokratis                                    |  | Indeks Demokrasi Indonesia Kalimantan Timur  | 81,02          | 81,15                   | 25                    | 25    | 31,15 |       |
|   |   |  | Meningkatnya partisipasi politik masyarakat                            | Indeks Kapasitas Lembaga Demokrasi           | 77,90          | 78,10                   | 25                    | 25    | 28,10 | 0     |
|   |   |  | Meningkatnya persatuan dan kesatuan masyarakat                         | Jumlah potensi konflik ipoleksosbud          | 31             | 90                      | 22,5                  | 22,5  | 22,5  | 22,5  |
|   |   | Mewujudkan birokrasi pemerintahan yang akuntabel dan memiliki pelayanan publik berkualitas | Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan layanan publik Perangkat Daerah | Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah  | 74,26          | 75,50                   | 0                     | 37,75 | 0     | 37,75 |
|   |   |  |  | Nilai akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah | 66,97          | 68,50                   | 0                     | 68,50 | 0     | 0     |

|  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  | Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga;<br>8. Pengelolaan Pemerintah yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya;<br>9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

a. Capaian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur pada Triwulan I Tahun 2025

Berdasarkan Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan sebelumnya, maka perlu dilakukan perhitungan untuk mengetahui capaian kinerja yang dicapai oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur. Rumus yang digunakan dalam menghitung capaian kinerja tersebut adalah sebagai berikut :

Persentase Pengukuran Kinerja (Positif) =  $\text{Realisasi} / \text{Target} \times 100\%$

Persentase Pengukuran Kinerja (Negatif) =  $\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target}) / \text{Target} \times 100\%$

Tabel 1.2  
Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025

| No | Sasaran  | Indikator Kinerja                            | Target TW I | Realisasi TW I | Capaian (%) |
|----|--|--|-------------|----------------|-------------|
| 1  | 2  | 3  | 4           | 5              | 6           |
| 1  | Meningkatnya partisipasi politik masyarakat                            | Indeks Kapasitas Lembaga Demokrasi           | 25          | 25             | 100         |
| 2  | Meningkatnya persatuan dan kesatuan masyarakat                         | Jumlah potensi konflik ipoleksosbud          | 22,5        | 12             | 146,67      |
| 3  | Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan layanan publik Perangkat Daerah | Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah  | 0           | 0              | 100         |
|    |  | Nilai akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah | 0           | 0              | 100         |

**1. Sasaran Strategis pertama : Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat.**

Capaian sasaran strategis ini diukur melalui indikator kinerja yaitu Indeks Kapasitas Lembaga Demokrasi di Kalimantan Timur, dimana dalam upaya pencapaiannya didukung oleh 1 (satu) program, yaitu : Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan

Pengembangan Etika Serta Budaya Politik. Program ini terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan, yakni:

1. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik. Dengan Sub kegiatan :

1. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.
2. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.

Sasaran ini dicapai melalui 1 (satu) Indikator Kinerja Utama yaitu Skor IDI Aspek Indeks Kapasitas Lembaga Demokrasi Badan Kesbangpol Provinsi Kalimantan (Nilai/Angka).

Indeks Kapasitas Lembaga Demokrasi di Kalimantan Timur merupakan salah satu aspek dalam perhitungan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). Indeks Kapasitas Lembaga Demokrasi menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Kalimantan Timur. Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan delapan indikator demokrasi, yaitu Kinerja Lembaga Demokrasi, Kinerja Lembaga Yudikatif, Netralisasi Penyelenggara Pemilu, Putusan pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait kebijakan pejabat pemerintah, Jaminan pemerintah/pemerintah daerah terhadap pelestarian lingkungan dan ruang hidup masyarakat, Transparansi anggaran dalam bentuk penyediaan informasi APBN/D oleh pemerintah Kinerja birokrasi dalam pelayanan publik. Indeks Kapasitas Lembaga Demokrasi di Kalimantan Timur tidak hanya melihat gambaran demokrasi yang berasal dari sisi kinerja pemerintah/birokrasi saja. Namun, Indeks Kapasitas Lembaga Demokrasi Kalimantan Timur juga melihat perkembangan demokrasi dari aspek peran masyarakat, lembaga legislatif (DPRD), partai politik, lembaga peradilan, dan penegak hukum. Oleh karena itu,



perkembangan Indeks Demokrasi Kalimantan Timur merupakan tanggung jawab bersama pemerintah dan masyarakat.

Angka Indeks Kapasitas Lembaga Kalimantan Timur merupakan indikator untuk mengukur tingkat perkembangan dan kemajuan indikator pembangunan demokrasi. Rilis Indeks Demokrasi Kalimantan Timur dilakukan setiap tahun, Indeks Demokrasi Kalimantan Timur dirilis H+1 dari tahun berkenaan, sehingga Indeks Demokrasi Kalimantan Timur yang disajikan pada laporan ini merupakan Indeks Kapasitas Lembaga Kalimantan Timur Tahun 2024.

Secara spesifik, aspek-aspek demokrasi yang diukur dalam I Indeks Kapasitas Lembaga Demokrasi Kalimantan Timur adalah Kebebasan Sipil (7 indikator di dalamnya), Aspek Kesenjangan (7 indikator) serta Aspek Lembaga Demokrasi (8 indikator). Hasil Indeks Demokrasi Kalimantan Timur disampaikan dalam bentuk angka dari 0 yang paling rendah sampai dengan 100 yang paling tinggi. Angka ini dibagi dalam kategori kualitas capaian sebagai berikut: 60< Buruk; 60-80 Sedang; >80 Baik.

Program/kegiatan yang mendukung capaian sasaran strategis meningkatnya partisipasi politik masyarakat pada triwulan I tahun 2025 antara lain:

1. Kegiatan Coffe Morning dilaksanakan di Hotel Fugo Samarinda pada tanggal 22 Januari 2025 dengan jumlah peserta sebanyak 50 orang.
2. Kegiatan Rapat Kerja Tenisi Bidang Poldagri dilaksanakan di Hotel Midtown Samarinda pada tanggal 30 Januari 2025 dengan jumlah peserta sebanyak 60 orang.
3. Kegiatan Rapat Pembahasan Kenaikan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Kabupaten Paser dilaksanakan di Ruang Kersik Luway Kantor Badan Kesbangpol Prov.Kaltim Lantai 2 pada tanggal 31 Januari 2025 dengan jumlah peserta sebanyak 25 orang.
4. Kegiatan Rapat Revisi Anggaran Hibah Pilkada Tahun 2024 dilaksanakan di Ruang Bina Masyarakat Kantor Badan Kesbangpol Prov.Kaltim Lantai 2 pada tanggal 25 Februari 2025 dengan jumlah peserta sebanyak 15 orang.
5. Kegiatan Rapat Pembahasan Adendum NPHD Pemilihan Gubernur Tahun 2024 dilaksanakan di Ruang Bina Masyarakat Kantor Badan Kesbangpol Prov.Kaltim Lantai 2 pada tanggal 3 Maret 2025 dengan jumlah peserta 25 orang

6. Kegiatan Rapat Pembahasan Permohonan Bantuan Anggaran PSU Kabupaten Mahakam Ulu dilaksanakan di Ruang Kersik Luway Kantor Badan Kesbangpol Prov.Kaltim Lantai 2 pada tanggal 17 Maret 2025 dengan jumlah peserta 15 orang.
7. Kegiatan Rapat Pembahasan Perubahan RAB Hibah Bawaslu dan KPU Provinsi Kalimantan Timur dilaksanakan di Ruang Kersik Luway Kantor Badan Kesbangpol Prov.Kaltim Lantai 2 pada tanggal 21 Maret 2025 dengan jumlah peserta 25 orang.

## 2. Sasaran Strategis Kedua : Meningkatnya Persatuan dan Kesatuan Masyarakat.

Sasaran ini dicapai melalui 1 (satu) Indikator Kinerja Utama yaitu : Jumlah Potensi Konflik Ipoleskosbud, dimana dalam upaya pencapaiannya didukung oleh 3 (tiga) program, yaitu : Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan, Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan, Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya dan Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial. Program ini terdiri dari 4 (empat) kegiatan dan 16 (enam belas) sub kegiatan.

Data Potensi Konflik Ipoleskosbud Triwulan I Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.3  
Data Potensi Konflik Ipoleskosbud Triwulan I Tahun 2025

| No | Kabupaten/Kota  | Potensi Konflik   | Jenis Potensi Konflik | Keterangan   |
|----|-----------------|---|-----------------------|--|
| 1  | 2               | 3   | 4                     | 5  |
| 1  | Kota Bontang    | Aliran jamaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) yang ada di Kota Bontang berjumlah 50 orang jamaah, berencana mendaftarkan ke Kesbangpol. | Ideologi              | Aliran Ahmadiyah pada tahun 2005 berdasarkan fatwa MUI adalah aliran sesat dan menyesatkan. Th 2024 pertemuan tahunan JAI di Kab Kuningan Prov Jateng mendapat penolakan Masyarakat. |
| 2  | Kota Balikpapan | Ormas Gepak Kuning, LPADKT-KU dan Baladika Mulawarman melakukan aksi unjuk rasa damai dan melakukan aksi                          | Sosbud                | Penolakan masih terus dilakukan.   |

|   |                             |   |          |  |
|---|-----------------------------|---|----------|--|
|   |                             | sweeping terhadap atribut ormas GRIB JAYA dan melakukan orasi di depan Kantor DPRD Kota Balikpapan  |          |  |
| 3 | Kabupaten Berau             | RDP antara DPRD Berau dengan PT. Berau Coal terkait pemutusan hubungan kerja massal.  | Sosbud   | Dalam proses pengadilan  |
| 4 | Kabupaten Kutai Kartanegara | PT. TSB, PT. SUAN, PT.MDP dengan pengurus persatuan petani kelapa sawit muara badak (PPKS) mengeluhkan akrena PT. SUAN tidak beroperasi dan tutup total sehingga masyarakat sebagai mitra kesulitan dalam menjual hasil panen sawit, meminta agar PT SUAN beroperasi Kembali. | Sosbud   | Pengurus petani sudah bersurat ke DPRD Kukar agar difasilitasi pertemuan dengan PT. SUAN |
| 5 | Kota Samarinda              | Unjuk rasa Gabungan supporter Borneo FC menuntut agar GOR Segiri digunakan pada liga 1 BRI 2025 dan mengancam akan melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Kaltim jika tuntutan tidak dipenuhi   | Sosbud   | Dalam proses pengendalian  |
| 6 | Kota Samarinda              | Aliansi mahasiswa Kaltim menggugat dan menolak RUU Minerba, menolak izin usaha pertambangan bagi perguruan tinggi.  | Sosbud   | Dalam proses pengendalian  |
| 7 | Kota Samarinda              | Penolakan warga Masyarakat kelurahan Sungai kledeng terhadap rencana Pembangunan gereja toraja bukit harapan loa janan cabang kebaktian Sungai keledang.  | Ideologi | Dalam proses pengendalian  |
| 8 | Kota Bontang                | Masyarakat menuntut PT. PHSS (Pertamina Hulu Sanga-Sanga) agar memberikan tali asih kepada 299 anggota persatuan bididaya kerrang dara yang   | Sosial   | Dalam proses pengendalian  |

|    |                               |  |        |                           |
|----|-------------------------------|--|--------|---------------------------|
|    |                               | terdampak atas dugaan limbah hasil pengeboran RIG GWDC 16 yang berada di proyek PHSS.  |        |                           |
| 9  | Kabupaten Penajam Paser Utara | Aliansi peduli nelayan kerrang dara (APNKD) menuntut PT. PHSS melakukan Ganti rugi terhadap nelayan yang terdampak atas pencemaran limbah yang membuat karang dara mati secara massal. | Sosial | Dalam proses pengendalian |
| 10 | Kota Samarinda                | Aliansi Masyarakat Pelabuhan maritim/tenaga kerja bongkar muat samarinda menuntut penutupan alur Sungai Mahakam.   | Sosial | Dalam proses pengendalian |
| 11 | Kabupaten Kutai Timur         | Kelompok tani gunung jepu-jepu menuntut agar PT. Kobexindo Coment membayar Ganti rugi lahan kelompok tani jepu-jepu Bersatu.   | Sosial | Dalam proses pengendalian |
| 12 | Kabupaten Paser               | Aliansi honorer menolak kebijakan pemunduran penerbitan SK PNS dan PPPK  | Sosial | Dalam proses pengendalian |

Program yang mendukung capaian sasaran strategis Meningkatnya Persatuan dan Kesatuan Masyarakat pada triwulan I tahun 2025 antara lain:

1. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan. Kegiatan yang menunjang capaian sasaran triwulan I tahun 2025 adalah sebagai berikut:
  1. Kegiatan Rapat Kerja Teknis perihal Rapat Pembentukan Paskibraka 2025, dilaksanakan di Ruang Bina Masyarakat Kantor Badan Kesbangpol Prov.Kaltim Lantai 2 pada tanggal 11 Februari 2025, dengan jumlah peserta sebanyak 50 orang.
  2. Sosialisasi Rapat Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Provinsi Kalimantan Timur pada triwulan I tahun 2025, dilaksanakan di Ruang Bina Masyarakat Kantor Badan Kesbangpol Prov.Kaltim Lantai 2 pada tanggal 4 Maret 2025, dengan jumlah peserta sebanyak 50 orang.

2. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan. Kegiatan yang menunjang capaian sasaran pada triwulan I tahun 2025 adalah sebagai berikut:
    1. Kegiatan coffe morning dengan ormas di Samarinda, dilaksanakan di Decafe Samarinda, dengan jumlah peserta sebanyak 50 orang.
    2. Kegiatan pembinaan dan pemberdayaan Ormas di Kota Balikpapan, dilaksanakan pada tanggal 27 Februari 2025 dengan jumlah peserta sebanyak 60 Peserta.
    3. Kegiatan coffe morning dengan ormas di Samarinda, dilaksanakan di Decafe Samarinda pada tanggal 28 Februari 2025, dengan jumlah peserta sebanyak 50 orang.
  3. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial. Kegiatan yang menunjang capaian sasaran pada triwulan I tahun 2025 adalah sebagai berikut:
    1. Kegiatan Rapat Tim Terpadu Penangana Konflik Sosial Provinsi Kalimantan Timur dilaksanakan di Decafe Samarinda pada tanggal 05 Februari 2025 dengan jumlah peserta sebanyak 30 orang.
    2. Kegiatan Sosialisasi Peran Intelektual Muda Dalam Pencegahan Radikalisme dan Terorisme di Kalimantan Timur dilaksanakan di Hotel Bintang Sintuk – Bontang pada tanggal 12 Februari 2025 dengabn jumlah peserta sebanyak 100 orang.
- 3. Sasaran Strategis Ketiga : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Layanan Publik Perangkat Daerah.**

Sasaran ini dicapai melalui 2 (dua) Indikator Kinerja Utama yaitu : Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah dan Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.

#### 3.1 Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah

Capaian kinerja sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Layanan Publik Perangkat Daerah pada triwulan I tahun 2025 dengan Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat daerah adalah sebesar 100%, yaitu realisasi 0 dari target 0. Capaian ini sudah sesuai dengan target yang ditetapkan, triwulan pertama merupakan tahapan dalam perhitungan SKM yang dilaksanakan pada akhir semester pertama yaitu bulan juni 2025.

### 3.2 Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Capaian kinerja sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Layanan Publik Perangkat Daerah pada triwulan I tahun 2025 dengan Indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah adalah sebesar 100%, yaitu realisasi 0 dari target 0. Capaian ini sudah sesuai dengan target yang ditetapkan, triwulan pertama merupakan tahapan dalam penilaian SAKIP, nilai akhir SAKIP oleh Inspektorat diterima paling lambat triwulan dua Tahun 2025.

#### B. REALISASI ANGGARAN

Realisasi anggaran yang telah digunakan pada triwulan I tahun 2025 untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja. Berikut ini disajikan realisasi anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur pada triwulan I tahun 2025, sebagai berikut:

Tabel 1.4  
Realisasi Anggaran sesuai dengan Perjanjian Kinerja Triwulan I Tahun 2025

| No     | Sasaran Strategis  | Indikator                                    | Kinerja     |                |           | Anggaran           |                  |           |
|--------|--|--|-------------|----------------|-----------|--------------------|------------------|-----------|
|        |  |  | Target TW I | Realisasi TW I | % Capaian | Target TW I        | Realisasi TW I   | % Capaian |
| 1      | 2  |  | 3           | 4              | 5         | 6                  | 7                | 8         |
| 1      | Meningkatnya partisipasi politik masyarakat                            | Indeks Kapasitas Lembaga Demokrasi           | 25          | 25             | 100       | 65.478.442.131,00  | 71.328.100,00    | 0,11%     |
| 2      | Meningkatnya persatuan dan kesatuan masyarakat                         | Jumlah potensi konflik ipoleksosbud          | 22,5        | 12             | 146,47    | 16.840.117.374,00  | 324.746.138,00   | 1,93%     |
| 3      | Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan layanan publik Perangkat Daerah | Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah  | 0           | 0              | 100       | 21.128.680.495,00  | 2.241.032.717,00 | 2,24%     |
|        |  | Nilai akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah | 0           | 0              | 100       |                    |                  |           |
| Jumlah |  |  |             |                |           | 103.447.240.000,00 | 2.637.106.955,00 | 2,55%     |

Adapun realisasi anggaran pada masing-masing program dan kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kaltim pada triwulan I tahun 2025 dapat dilihat melalui tabel dibawah ini:

Tabel 1.5  
Realisasi Anggaran per Program dan Kegiatan pada Triwulan I Tahun  
2025

| No | Program/Kegiatan  | Anggaran       |                |       | Keterangan |
|----|---|----------------|----------------|-------|------------|
|    |   | Target TW I    | Realisasi TW I | %     |            |
| 1  | 2   | 3              | 4              | 5     | 6          |
| 1  | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI   | 21.128.680.495 | 2.241.032.717  | 10,61 |            |
|    | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  | 688.897.112    | -              | 0,00  |            |
|    | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah   | 22.672.808     | -              | 0,00  |            |
|    | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD   | 1.521.404      | -              | 0,00  |            |
|    | Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD   | 1.001.404      | -              | 0,00  |            |
|    | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD   | 1.001.404      | -              | 0,00  |            |
|    | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | 451.146.728    | -              | 0,00  |            |
|    | Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 211.553.364    | -              | 0,00  |            |
|    | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  | 12.397.929.294 | 1.841.340.720  | 14,85 |            |
|    | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   | 11.829.909.638 | 1.739.280.720  | 14,70 |            |
|    | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN   | 476.760.000    | 102.060.000    | 21,41 |            |
|    | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD  | 2.888.424      | -              | 0,00  |            |
|    | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan   | 741.404        | -              | 0,00  |            |
|    | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD  | 86.368.424     | -              | 0,00  |            |
|    | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran  | 1.261.404      | -              | 0,00  |            |
|    | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah  | 183.817.722    | -              | 0,00  |            |
|    | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD   | 481.404        | -              | 0,00  |            |
|    | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD   | 180.370.702    | -              | 0,00  |            |
|    | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD   | 1.482.808      | -              | 0,00  |            |
|    | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD   | 1.482.808      | -              | 0,00  |            |
|    | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah   | 111.417.712    | -              | 0,00  |            |
|    | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya  | 50.233.500     | -              | 0,00  |            |
|    | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian   | 481.404        | -              | 0,00  |            |
|    | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai   | 481.404        | -              | 0,00  |            |
|    | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi   | 60.221.404     | -              | 0,00  |            |
|    | Administrasi Umum Perangkat Daerah  | 3.406.720.820  | 126.620.564    | 3,72  |            |
|    | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor  | 2.386.618      | -              | 0,00  |            |
|    | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor  | 793.261.304    | -              | 0,00  |            |
|    | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan   | 145.167.700    | 1.945.400      | 1,34  |            |

|   |  |                |             |       |  |
|---|--|----------------|-------------|-------|--|
|   | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD   | 1.941.087.450  | 124.675.164 | 6,42  |  |
|   | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD  | 289.521.404    | -           | 0,00  |  |
|   | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD   | 235.296.344    | -           | 0,00  |  |
|   | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah   | 3.056.830.404  | -           | 0,00  |  |
|   | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan  | 2.881.793.386  | -           | 0,00  |  |
|   | Pengadaan Mebel  | 175.037.018    | -           | 0,00  |  |
|   | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | 915.886.432    | 259.370.243 | 28,32 |  |
|   | Penyediaan Jasa Surat Menyurat   | 30.034.000     | -           | 0,00  |  |
|   | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  | 181.735.120    | 14.721.319  | 8,10  |  |
|   | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | 704.117.312    | 244.648.924 | 34,75 |  |
|   | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  | 367.180.999    | 13.701.190  | 3,73  |  |
|   | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan   | 72.741.999     | 5.950.200   | 8,18  |  |
|   | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan  | 154.939.000    | 7.750.990   | 5,00  |  |
|   | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | 39.800.000     | -           | 0,00  |  |
|   | Pemeliharaan Aset Tak Berwujud   | 99.700.000     | -           | 0,00  |  |
| 2 | PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN   | 10.373.098.516 | 103.942.950 | 1,00  |  |
|   | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan  | 10.373.098.516 | 103.942.950 | 1,00  |  |
|   | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan  | 1.349.128.354  | 24.498.865  | 1,82  |  |
|   | Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan                            | 171.668.424    | 17.241.900  | 10,04 |  |
|   | Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara | 218.634.006    | -           | 0,00  |  |
|   | Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila  | 461.253.510    | 20.290.000  | 4,40  |  |
|   | Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka  | 2.404.833.270  | -           | 0,00  |  |
|   | Pelaksanaan tugas Paskibraka   | 4.482.601.540  | -           | 0,00  |  |
|   | Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila   | 54.905.980     | -           | 0,00  |  |
|   | Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila   | 255.669.006    | -           | 0,00  |  |
|   | Pembentukan Paskibraka   | 974.404.426    | 41.912.185  | 4,30  |  |
| 3 | PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA   | 65.478.442.131 | 71.328.100  | 0,11  |  |



|   |  |                |             |       |  |
|---|--|----------------|-------------|-------|--|
|   | PENDIDIKAN MELALUI<br>PENDIDIKAN POLITIK DAN<br>PENGEMBANGAN ETIKA SERTA<br>BUDAYA POLITIK   |                |             |       |  |
|   | Perumusan Kebijakan Teknis dan<br>Pemantapan Pelaksanaan Bidang<br>Pendidikan Politik, Etika Budaya<br>Politik, Peningkatan Demokrasi,<br>Fasilitasi Kelembagaan<br>Pemerintahan, Perwakilan dan<br>Partai Politik, Pemilihan<br>Umum/Pemilihan Umum Kepala<br>Daerah, serta Pemantauan<br>Situasi Politik       | 65.478.442.131 | 71.328.100  | 0,11  |  |
|   | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang<br>Pendidikan Politik, Etika Budaya<br>Politik, Peningkatan Demokrasi,<br>Fasilitasi Kelembagaan<br>Pemerintahan, Perwakilan dan<br>Partai Politik, Pemilihan<br>Umum/Pemilihan Umum Kepala<br>Daerah, serta Pemantauan<br>Situasi Politik di Daerah                             | 65.037.110.403 | 600.000     | 0,00  |  |
|   | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi<br>dan Pelaporan di Bidang<br>Pendidikan Politik, Etika Budaya<br>Politik, Peningkatan Demokrasi,<br>Fasilitasi Kelembagaan<br>Pemerintahan, Perwakilan dan<br>Partai Politik, Pemilihan<br>Umum/Pemilihan Umum Kepala<br>Daerah, serta Pemantauan<br>Situasi Politik di Daerah | 441.331.728    | 70.728.100  | 16,03 |  |
| 4 | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN<br>PENGAWASAN ORGANISASI<br>KEMASYARAKATAN  | 1.359.680.314  | 73.909.302  | 5,44  |  |
|   | Perumusan Kebijakan Teknis dan<br>Pemantapan Pelaksanaan Bidang<br>Pemberdayaan dan Pengawasan<br>Organisasi Kemasyarakatan  | 1.359.680.314  | 73.909.302  | 5,44  |  |
|   | Pelaksanaan Kebijakan Di bidang<br>Pendaftaran Ormas,<br>Pemberdayaan Ormas, Evaluasi<br>dan Mediasi Sengketa Ormas,<br>Pengawasan Ormas dan Ormas<br>Asing di Daerah  | 1.174.860.728  | 73.049.302  | 6,22  |  |
|   | Pelaksanaan Monitoring Evaluasi<br>dan Pelaporan Di bidang<br>Pendaftaran Ormas,<br>Pemberdayaan Ormas, Evaluasi<br>dan Mediasi Sengketa Ormas,<br>Pengawasan Ormas dan Ormas<br>Asing di Daerah   | 184.819.586    | 860.000     | 0,47  |  |
| 5 | PROGRAM PEMBINAAN DAN<br>PENGEMBANGAN KETAHANAN<br>EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA   | 1.367.982.119  | 17.374.322  | 1,27  |  |
|   | Perumusan Kebijakan Teknis dan<br>Pemantapan Pelaksanaan Bidang<br>Ketahanan Ekonomi, Sosial dan<br>Budaya   | 1.367.982.119  | 17.374.322  | 1,27  |  |
|   | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang<br>Ketahanan Ekonomi, Sosial,<br>Budaya dan Fasilitasi Pencegahan<br>Penyalagunaan Narkotika,<br>Fasilitasi Kerukunan Umat<br>Beragama dan Penghayat<br>Kepercayaan di Daerah  | 1.230.775.937  | 15.603.322  | 1,27  |  |
|   | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi<br>dan Pelaporan di Bidang<br>Ketahanan Ekonomi, Sosial,<br>Budaya dan Fasilitasi Pencegahan<br>Penyalagunaan Narkotika,<br>Fasilitasi Kerukunan Umat<br>Beragama dan Penghayat<br>Kepercayaan di Daerah  | 137.206.182    | 1.771.000   | 1,29  |  |
| 6 | PROGRAM PENINGKATAN<br>KEWASPADAAN NASIONAL DAN<br>PENINGKATAN KUALITAS DAN<br>FASILITASI PENANGANAN<br>KONFLIK SOSIAL   | 3.739.356.425  | 129.519.564 | 3,46  |  |

|  |   |                 |                  |      |  |
|--|---|-----------------|------------------|------|--|
|  | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial  | 3.739.356.425   | 129.519.564      | 3,46 |  |
|  | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah                          | 1.606.719.885   | 105.775.360      | 6,58 |  |
|  | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | 241.200.000     | 12.120.300       | 5,03 |  |
|  | Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi   | 1.891.436.540   | 11.623.904       | 0,61 |  |
|  | Total Belanja Daerah  | 103.447.240.000 | 2.637.106.955,00 | 2,55 |  |

Dari tabel diatas dijelaskan bahwa realisasi keuangan per program kegiatan mencapai 2,55% hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program kegiatan sudah terealisasi sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

## BAB II

### PERMASALAHAN, REKOMENDASI DAN TINDAK LANJUT

#### A. Kendala Permasalahan, Rekomendasi dan tindak lanjut

Pada Triwulan I Tahun Anggaran 2025, dari segi pencapaian kinerja yang akan dicapai, beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai jadwal, namun ada beberapa kendala yang dihadapi adalah sebagai berikut :

Untuk lebih jelas Permasalahan, Rekomendasi dan Tindak Lanjut tertuang dalam table sebagai berikut:

Tabel 2.1

Permasalahan, Rekomendasi dan Tindak Lanjut

| No | Uraian   | Permasalahan  | Rekomendasi  | Tindak Lanjut  |
|----|--|---|--|--|
| 1  | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                   | a. Belanja modal masih proses pemilihan penyedia, pengiriman dan pembayaran.<br>b. Belanja barang dan jasa yang masih dalam proses pertanggungjawaban dan pembayaran.<br>c. Masih kurangnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan informasi,<br>b. Untuk Kegiatan rutin kantor, realisasi anggaran disesuaikan dengan kebutuhan. | a. Segera menyelesaikan pemilihan penyedia.<br>b. Segera menyelesaikan kelengkapan administrasi dan pembayaran.<br>c. Segera menyelesaikan pemilihan penyedia. | a. Akan segera menyelesaikan pemilihan penyediaan pada triwulan selanjutnya.<br>b. Berkas administrasi akan segera diselesaikan. |
| 2  | Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | a. Adanya efisiensi anggaran sehingga menggeser anggaran<br>b. Dalam pelaksanaan kegiatan mengalami kesulitan menemukan tempat dengan kapasitas besar dengan fasilitas pendukung yang layak.  | Agar dapat menyesuaikan Kembali jadwal pelaksanaan kegiatan  | Pelaksanaan kegiatan segera dilaksanakan   |
| 3  | Program Peningkatan Peran partai Politik dan Lembaga         | a. Adanya efisiensi anggaran sehingga   | a. Agar segera menyesuaikan  | Akan dilaksanakan koordinasi dengan  |

|   |   |  |   |   |
|---|---|--|---|---|
|   | Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik | <p>menggeser anggaran</p> <p>b. Dalam pelaksanaan kegiatan mengalami kesulitan menemukan tempat dengan kapasitas besar dengan fasilitas pendukung yang layak.</p> <p>c. Bantuan keuangan kepada partai politik belum bisa dilaksanakan karena LHP dari BPK belum diterbitkan.</p> <p>d. Terdapat perubahan penggunaan hibah kepada instansi vertikal berdasarkan usulan yang bersangkutan.</p> | <p>Kembali jadwal kegiatan.</p> <p>b. Agar segera berkoordinasi dengan BPK terkait LHP Bankeu Parpol</p>                  | instansi vertikal   |
| 4 | Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan                     | <p>a. Adanya efisiensi anggaran sehingga menggeser anggaran</p> <p>b. Dalam pelaksanaan kegiatan mengalami kesulitan menemukan tempat dengan kapasitas besar dengan fasilitas pendukung yang layak.</p>  | <p>a. Agar dapat menyesuaikan Kembali jadwal pelaksanaan kegiatan</p> <p>b. Agar segera melakukan pergeseran anggaran</p> | Mengubah jadwal kegiatan/rencana aksi sesuai dengan hasil pergeseran anggarab |
| 5 | Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya           | <p>a. Adanya efisiensi anggaran sehingga menggeser anggaran</p> <p>b. Dalam pelaksanaan kegiatan mengalami kesulitan menemukan tempat dengan kapasitas besar dengan fasilitas pendukung yang layak.</p>  | <p>a. Agar dapat menyesuaikan Kembali jadwal pelaksanaan kegiatan</p> <p>b. Agar segera melakukan pergeseran anggaran</p> | Mengubah jadwal kegiatan/rencana aksi sesuai dengan hasil pergeseran anggarab |
| 6 | Program Peningkatan   | a. Adanya efisiensi  | a. Agar dapat   | Mengubah jadwal   |

|  |   |  |   |   |
|--|---|--|---|---|
|  | Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik | <p>anggaran sehingga menggeser anggaran</p> <p>b. Dalam pelaksanaan kegiatan mengalami kesulitan menemukan tempat dengan kapasitas besar dengan fasilitas pendukung yang layak.</p> <p>c. Masih banyak penyedia UMKM non PKP</p> <p>d. Masih banyak penyedia belum membuat akun</p> <p>Ipse v6</p> | <p>menyesuaikan Kembali jadwal pelaksanaan kegiatan</p> <p>b. Agar segera melakukan pergeseran anggaran</p> | kegiatan/rencana aksi sesuai dengan hasil pergeseran anggaran |
|--|---|--|---|---|

### **BAB III**

### **P E N U T U P**

Hasil dari capaian sasaran strategis yang telah dilaksanakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur sampai dengan Triwulan I Tahun 2025, dari 4 (empat) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan telah dapat dilaporkan perkembangan capaiannya.

Secara keseluruhan pencapaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur pada triwulan I tahun 2025 dalam kategori sangat baik, namun harus diakui masih banyak kendala dan permasalahan yang dihadapi karena itu untuk meningkatkan kinerja pada triwulan berikutnya.

Demikian Laporan Capaian Kinerja pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur Triwulan I Tahun 2025 disusun, dengan harapan dapat memenuhi fungsinya sebagai sarana berakuntabilitas sesuai amanat yang telah diemban dan menjadi sarana umpan balik bagi peningkatan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur di masa yang akan datang dan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang memerlukan.

Samarinda, 03 April 2025

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Provinsi Kalimantan Timur



**Drs. Sufian Agus, M Si**  
**Pembina Utama Muda IV/c**  
**NIP. 196602041988031016**

## LAMPIRAN

TRIWULAN I TAHUN 2025

**LAPORAN SASARAN KINERJA RPD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
DAN IKU RENSTRA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI KALTIM  
BULAN JANUARI-MARET 2025**

| REALISASI KINERJA TUJUAN DAN SASARAN: RPD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |   |   |        |        |  |           |                     |
|---|---|---|--------|--------|--|-----------|---------------------|
| NO.   | TUJUAN / SASARAN RPD  | TOLAK UKUR / INDIKATOR KERJA                  | TARGET |        | URAIAN / PERHITUNGAN   | REALISASI | CAPAIAN KINERJA (%) |
|   |   |   | VOL    | SATUAN |  |           |                     |
| 1   | Tujuan : Terwujudnya masyarakat Kalimantan Timur yang demokratis                                    | Indeks Demokrasi Indonesia Kalimantan Timur   | 81,15  | Indeks | $I(X_{ijk}) = \frac{(X_{ijk} - X_{terburuk})}{(X_{ideal} - X_{terburuk})} \times 100$  | 25        | 30,81               |
| 1,1   | Sasaran : Meningkatkan partisipasi politik masyarakat   | Indeks Kapasitas Lembaga Demokrasi            | 78,00  | Indeks | $I(X_{ijk}) = \frac{(X_{ijk} - X_{terburuk})}{(X_{ideal} - X_{terburuk})} \times 100$  | 25        | 32,05               |
| 1,2   | Sasaran : Meningkatkan persatuan dan kesatuan masyarakat  | Jumlah potensi konflik Ipoleksosbud           | 90,00  | Jumlah | Jumlah hasil pemantauan di lapangan potensi konflik di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya  | 12        | 186,67              |
| 2   | Tujuan : Mewujudkan birokrasi pemerintahan yang akuntabel dan memiliki pelayanan publik berkualitas | Indeks kepuasan masyarakat pemerintah daerah  | 85,50  | Indeks | Hasil Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur | 0         | 0,00                |
|   |   | Nilai akuntabilitas kinerja pemerintah daerah | 79,30  | Nilai  | Indeks Kepuasan Masyarakat = (Nilai Unsur Pelayanan ×  | 0         | 0,00                |
| 2,1   | Sasaran: Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Pelayanan Publik Perangkat Daerah                   | Indeks Kepuasan Masyarakat                    | 75,50  | Indeks | Indeks Kepuasan Masyarakat = (Nilai Unsur Pelayanan × Bobot) × Nilai Dasar   | 0         | 0,00                |
|   |   | Nilai Akuntabilitas Kinerja                   | 68,50  | Nilai  | Hasil Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur | 0         | 0,00                |

| REALISASI KINERJA IKU RENSTRA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |  |                                     |        |        |   |           |                     |
|---|--|-------------------------------------|--------|--------|---|-----------|---------------------|
| NO.   | SASARAN STRATEGIS                              | TOLAK UKUR / INDIKATOR KERJA        | TARGET |        | URAIAN / PERHITUNGAN  | REALISASI | CAPAIAN KINERJA (%) |
|   |  |                                     | VOL    | SATUAN |   |           |                     |
| 1   | Meningkatnya partisipasi politik masyarakat    | Indeks Kapasitas Lembaga Demokrasi  | 78,00  | Indeks | $I(X_{ijk}) = \frac{(X_{ijk} - X_{terburuk})}{(X_{ideal} - X_{terburuk})} \times 100$                       | 0         | 0,00                |
| 2   | Meningkatnya persatuan dan kesatuan masyarakat | Jumlah potensi konflik Ipoleksosbud | 90     | jumlah | Jumlah hasil pemantauan di lapangan potensi konflik di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya | 3         | 196,00              |



|   |  |  |       |        |  |   |      |
|---|--|--|-------|--------|--|---|------|
| 3 | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Pelayanan Publik Perangkat Daerah | Indeks Kepuasan Masyarakat                   | 75,50 | Indeks | Indeks Kepuasan Masyarakat =<br>(Nilai Unsur Pelayanan × Bobot) × Nilai Dasar  | 0 | 0,00 |
|   |  | Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah | 75,50 | Poin   | Hasil Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur | 0 | 0,00 |

| REKAP REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN |  |   |           |             |                   |                |             |                           |
|--------------------------------------|--|---|-----------|-------------|-------------------|----------------|-------------|---------------------------|
| No.                                  | IKU / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN  | INDIKATOR KINERJA   | KINERJA   |             | ANGGARAN          |                |             | PENANGGUNG JAWAB          |
|                                      |  |   | REALISASI | CAPAIAN (%) | PAGU (Rp)         | REALISASI (Rp) | CAPAIAN (%) |                           |
| 1                                    | Meningkatnya partisipasi politik masyarakat  | Indeks Kapasitas Lembaga Demokrasi  | 0         | 0,00        | 65.478.442.131,00 | 71.328.100,00  | 0,11        | Drs. H. Sufian Agus, M.Si |
| 1.1                                  | PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA   | Persentase masyarakat yang mendapatkan pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik | 0,00      | 0,00        | 65.478.442.131,00 | 71.328.100,00  | 0,11        | Fatimah Waty, SE.,MM.     |
| 1.1.1                                | Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan | Jumlah rumusan kebijakan yang mendukung Peningkatan Kehidupan Masyarakat yang demokratis              | 0,00      | 0,00        | 65.478.442.131,00 | 71.328.100,00  | 0,11        | Fatimah Waty, SE.,MM.     |

|         |   |  |             |               |                          |                       |             |                                  |
|---------|---|--|-------------|---------------|--------------------------|-----------------------|-------------|----------------------------------|
| 1.1.1.1 | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi  | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah       | 0           | 0,00          | 65.037.110.403,00        | 600.000,00            | 0,00        | Fatimah Waty, SE.,MM.            |
| 1.1.1.2 | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | 0           | 0,00          | 441.331.728,00           | 70.728.100,00         | 16,03       | Fatimah Waty, SE.,MM.            |
| 2       | <b>Meningkatnya persatuan dan kesatuan masyarakat</b>   | <b>Jumlah potensi konflik Ipoleksosbud</b>   | <b>3,00</b> | <b>196,00</b> | <b>16.840.117.374,00</b> | <b>324.746.138,00</b> | <b>1,93</b> | <b>Drs. H. Sufian Agus, M.Si</b> |
| 2.1     | <b>PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN</b>   | <b>Persentase elemen masyarakat yang mendapatkan penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan</b>  | <b>0</b>    | <b>0,00</b>   | <b>10.373.098.516,00</b> | <b>103.942.950,00</b> | <b>1,00</b> | <b>Syarifuddin Noor, SH</b>      |
| 2.1.1   | <b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b>  | <b>Jumlah rumusan kebijakan yang mendukung penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b>  | <b>0</b>    | <b>0,00</b>   | <b>10.373.098.516,00</b> | <b>103.942.950,00</b> | <b>1,00</b> | <b>Syarifuddin Noor, SH</b>      |
| 2.1.1.1 | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan   | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan  | 0           | 0,00          | 1.349.128.354,00         | 24.498.865,00         | 1,82        | Syarifuddin Noor, SH             |

|         |  |   |   |      |                         |                      |             |                                  |
|---------|--|---|---|------|-------------------------|----------------------|-------------|----------------------------------|
| 2.1.1.2 | Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah                                       | Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan  | 0 | 0,00 | 171.668.424,00          | 17.241.900,00        | 10,04       | Syarifuddin Noor, SH             |
| 2.1.1.3 | Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara | Jumlah Dokumen Hasil Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara | 0 | 0,00 | 218.634.006,00          | 0,00                 | 0,00        | Syarifuddin Noor, SH             |
| 2.1.1.4 | Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila  | Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila   | 0 | 0,00 | 461.253.510,00          | 20.290.000,00        | 4,40        | Syarifuddin Noor, SH             |
| 2.1.1.5 | Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka  | Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka  | 0 | 0,00 | 2.404.833.270,00        | 0,00                 | 0,00        | Syarifuddin Noor, SH             |
| 2.1.1.6 | Pelaksanaan tugas Paskibraka   | Jumlah Dokumen Pelaksanaan Tugas Paskibraka   | 0 | 0,00 | 4.482.601.540,00        | 0,00                 | 0,00        | Syarifuddin Noor, SH             |
| 2.1.1.7 | Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila   | Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila  | 0 | 0,00 | 54.905.980,00           | 0,00                 | 0,00        | Syarifuddin Noor, SH             |
| 2.1.1.8 | Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila   | Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila  | 0 | 0,00 | 255.669.006,00          | 0,00                 | 0,00        | Syarifuddin Noor, SH             |
| 2.1.1.9 | Pembentukan Paskibraka   | Jumlah Paskibraka   | 0 | 0,00 | 974.404.426,00          | 41.912.185,00        | 4,30        | Syarifuddin Noor, SH             |
| 2.2     | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN</b>   | <b>Persentase organisasi masyarakat yang terdaftar dan aktif</b>  | 0 | 0,00 | <b>1.359.680.314,00</b> | <b>73.909.302,00</b> | <b>5,44</b> | <b>Tri Atmaji, S.Sos., M.Si.</b> |
| 2.2.1   | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan   | Jumlah rumusan kebijakan yang mendukung Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat   | 0 | 0,00 | 1.359.680.314,00        | 73.909.302,00        | 5,44        | Tri Atmaji, S.Sos., M.Si.        |

|         |  |   |   |      |                         |                       |             |                                    |
|---------|--|---|---|------|-------------------------|-----------------------|-------------|------------------------------------|
| 2.2.1.1 | Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah  | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah   | 0 | 0,00 | 1.174.860.728,00        | 73.049.302,00         | 6,22        | Tri Atmaji, S.Sos., M.Si.          |
| 2.2.1.2 | Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah  | Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah  | 0 | 0,00 | 184.819.586,00          | 860.000,00            | 0,47        | Tri Atmaji, S.Sos., M.Si.          |
| 2.3     | <b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA</b>  | <b>Persentase elemen masyarakat yang mendapatkan pembinaan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, dan agama</b>   | 0 | 0,00 | <b>1.367.982.119,00</b> | <b>17.374.322,00</b>  | <b>1,27</b> | <b>Tri Atmaji, S.Sos., M.Si.</b>   |
| 2.3.1   | <b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya</b>   | <b>Jumlah rumusan kebijakan yang mendukung penguatan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya</b>   | 0 | 0,00 | <b>1.367.982.119,00</b> | <b>17.374.322,00</b>  | <b>1,27</b> | <b>Tri Atmaji, S.Sos., M.Si.</b>   |
| 2.3.1.1 | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah                          | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah       | 0 | 0,00 | 1.230.775.937,00        | 15.603.322,00         | 1,27        | Tri Atmaji, S.Sos., M.Si.          |
| 2.3.1.2 | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | 0 | 0,00 | 137.206.182,00          | 1.771.000,00          | 1,29        | Tri Atmaji, S.Sos., M.Si.          |
| 2.4     | <b>PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL</b>  | <b>Persentase potensi konflik sosial yang ditangani</b>   | 0 | 0,00 | <b>3.739.356.425,00</b> | <b>129.519.564,00</b> | <b>3,46</b> | <b>Wildan Taufik, S.Pd., M.Si.</b> |

|         |   |  |        |        |                   |                  |       |   |
|---------|---|--|--------|--------|-------------------|------------------|-------|---|
| 2.4.1   | <b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial</b>   | <b>Jumlah rumusan kebijakan yang mendukung Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial</b>   | 0      | 0,00   | 3.739.356.425,00  | 129.519.564,00   | 3,46  | Wildan Taufik, S.Pd., M.Si.                   |
| 2.4.1.1 | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah                          | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah       | 0      | 0,00   | 1.606.719.885,00  | 105.775.360,00   | 6,58  | Wildan Taufik, S.Pd., M.Si.                   |
| 2.4.1.2 | Pelaksanaan monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | 0      | 0,00   | 241.200.000,00    | 12.120.300,00    | 5,03  | Wildan Taufik, S.Pd., M.Si.                   |
| 2.4.1.3 | Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi   | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi   | 0      | 0,00   | 1.891.436.540,00  | 11.623.904,00    | 0,61  | Wildan Taufik, S.Pd., M.Si.                   |
| 3       | <b>Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Pelayanan Publik Perangkat Daerah</b>   | <b>Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah</b>  | 0      | 0,00   | 21.128.680.495,00 | 2.241.032.717,00 | 10,61 | <b>Drs. H. Sufian Agus, M.Si</b>              |
|         |   | <b>Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah</b>   | 0      | 0,00   |                   |                  |       | <b>Drs. H. Sufian Agus, M.Si</b>              |
| 3.1     | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>  | <b>Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan</b>   | 1,95   | 2,48   | 21.128.680.495,00 | 2.241.032.717,00 | 10,61 | <b>Ahmad Firdaus Kurniawan, S.Sos., M.Si.</b> |
|         |   | <b>Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklaniuti</b>  | 100,00 | 100,00 |                   |                  |       |   |
| 3.1.1   | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>   | <b>Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yang ditetapkan tepat waktu</b>   | 0,00   | 0,00   | 688.897.112,00    | 0,00             | 0,00  | <b>Ahmad Firdaus Kurniawan, S.Sos., M.Si.</b> |
| 3.1.1.1 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah   | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  | 0,00   | 0,00   | 22.672.808,00     | 0,00             | 0,00  | Ahmad Firdaus Kurniawan, S.Sos., M.Si.        |
| 3.1.1.2 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD   | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD   | 0,00   | 0,00   | 1.521.404,00      | 0,00             | 0,00  | Ahmad Firdaus Kurniawan, S.Sos., M.Si.        |

|         |   |  |             |             |                          |                         |              |   |
|---------|---|--|-------------|-------------|--------------------------|-------------------------|--------------|---|
| 3.1.1.3 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD  | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD   | 0,00        | 0,00        | 1.001.404,00             | 0,00                    | 0,00         | Ahmad Firdaus Kurniawan, S.Sos., M.Si.        |
| 3.1.1.4 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD   | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 0,00        | 0,00        | 1.001.404,00             | 0,00                    | 0,00         | Ahmad Firdaus Kurniawan, S.Sos., M.Si.        |
| 3.1.1.5 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | 0,00        | 0,00        | 451.146.728,00           | 0,00                    | 0,00         | Ahmad Firdaus Kurniawan, S.Sos., M.Si.        |
| 3.1.1.6 | Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                    | 0,00        | 0,00        | 211.553.364,00           | 0,00                    | 0,00         | Ahmad Firdaus Kurniawan, S.Sos., M.Si.        |
| 3.1.2   | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>   | <b>Persentase realisasi anggaran</b>   | <b>0,29</b> | <b>0,30</b> | <b>12.397.929.294,00</b> | <b>1.841.340.720,00</b> | <b>14,85</b> | <b>Ahmad Firdaus Kurniawan, S.Sos., M.Si.</b> |
| 3.1.2.1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  | 55,00       | 100,00      | 11.829.909.638,00        | 1.739.280.720,00        | <b>14,70</b> | Ahmad Firdaus Kurniawan, S.Sos., M.Si.        |
| 3.1.2.2 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN   | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN   | 1,00        | 8,33        | 476.760.000,00           | 102.060.000,00          | 21,41        | Ahmad Firdaus Kurniawan, S.Sos., M.Si.        |
| 3.1.2.3 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD  | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD  | 0,00        | 0,00        | 2.888.424,00             | 0,00                    | <b>0,00</b>  | Ahmad Firdaus Kurniawan, S.Sos., M.Si.        |
| 3.1.2.4 | Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan   | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan   | 0,00        | 0,00        | 741.404,00               | 0,00                    | 0,00         | Ahmad Firdaus Kurniawan, S.Sos., M.Si.        |
| 3.1.2.5 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD  | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD                      | 1,00        | 8,33        | 86.368.424,00            | 0,00                    | 0,00         | Ahmad Firdaus Kurniawan, S.Sos., M.Si.        |
| 3.1.2.6 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran  | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran   | 0,00        | 0,00        | 1.261.404,00             | 0,00                    | 0,00         | Ahmad Firdaus Kurniawan, S.Sos., M.Si.        |
| 3.1.3   | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>   | <b>Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>183.817.722,00</b>    | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>  | <b>Ahmad Firdaus Kurniawan, S.Sos., M.Si.</b> |
| 3.1.3.1 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD   | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD  | 0,00        | 0,00        | 481.404,00               | 0,00                    | 0,00         | Ahmad Firdaus Kurniawan, S.Sos., M.Si.        |
| 3.1.3.2 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD   | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD   | 0,00        | 0,00        | 180.370.702,00           | 0,00                    | 0,00         | Ahmad Firdaus Kurniawan, S.Sos., M.Si.        |

|              |   |   |             |              |                         |                       |             |   |
|--------------|---|---|-------------|--------------|-------------------------|-----------------------|-------------|---|
| 3.1.3.3      | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD       | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD      | 0,00        | 0,00         | 1.482.808,00            | 0,00                  | 0,00        | Ahmad Firdaus Kurniawan, S.Sos., M.Si.        |
| 3.1.3.4      | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                             | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                            | 0,00        | 0,00         | 1.482.808,00            | 0,00                  | 0,00        | Ahmad Firdaus Kurniawan, S.Sos., M.Si.        |
| <b>3.1.4</b> | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                        | <b>Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan Pelatihan</b>                | <b>6,12</b> | <b>20,41</b> | <b>111.417.712,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> | <b>Ahmad Firdaus Kurniawan, S.Sos., M.Si.</b> |
| 3.1.4.1      | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                  | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan                                | 0,00        | 0,00         | 50.233.500,00           | 0,00                  | 0,00        | Ahmad Firdaus Kurniawan, S.Sos., M.Si.        |
| 3.1.4.2      | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                       | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                      | 0,00        | 0,00         | 481.404,00              | 0,00                  | 0,00        | Ahmad Firdaus Kurniawan, S.Sos., M.Si.        |
| 3.1.4.3      | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                     | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                    | 0,00        | 0,00         | 481.404,00              | 0,00                  | 0,00        | Ahmad Firdaus Kurniawan, S.Sos., M.Si.        |
| 3.1.4.4      | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi           | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan   | 3,00        | 15,00        | 60.221.404,00           | 0,00                  | 0,00        | Ahmad Firdaus Kurniawan, S.Sos., M.Si.        |
| <b>C</b>     | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                               | <b>Persentase pelaksanaan administrasi umum</b>                                       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>3.406.720.820,00</b> | <b>126.620.564,00</b> | <b>3,72</b> | <b>Ahmad Firdaus Kurniawan, S.Sos., M.Si.</b> |
| 3.1.5.1      | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor        | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan    | 0,00        | 0,00         | 2.386.618,00            | 0,00                  | 0,00        | Ahmad Firdaus Kurniawan, S.Sos., M.Si.        |
| 3.1.5.2      | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                            | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                        | 0,00        | 0,00         | 793.261.304,00          | 0,00                  | 0,00        | Ahmad Firdaus Kurniawan, S.Sos., M.Si.        |
| 3.1.5.3      | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                               | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                           | 0,00        | 0,00         | 145.167.700,00          | 1.945.400,00          | 1,34        | Ahmad Firdaus Kurniawan, S.Sos., M.Si.        |
| 3.1.5.4      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                   | 0,00        | 0,00         | 1.941.087.450,00        | 124.675.164,00        | 6,42        | Ahmad Firdaus Kurniawan, S.Sos., M.Si.        |
| 3.1.5.5      | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                   | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                  | 0,00        | 0,00         | 289.521.404,00          | 0,00                  | 0,00        | Ahmad Firdaus Kurniawan, S.Sos., M.Si.        |
| 3.1.5.6      | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD  | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 0,00        | 0,00         | 235.296.344,00          | 0,00                  | 0,00        | Ahmad Firdaus Kurniawan, S.Sos., M.Si.        |
| <b>3.1.6</b> | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b> | <b>Persentase Barang Milik Daerah yang diadakan</b>                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>3.056.830.404,00</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> | <b>Ahmad Firdaus Kurniawan, S.Sos., M.Si.</b> |
| 3.1.6.1      | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                     | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan                 | 0,00        | 0,00         | 2.881.793.386,00        | 0,00                  | 0,00        | Ahmad Firdaus Kurniawan, S.Sos., M.Si.        |
| 3.1.6.2      | Pengadaan Mebel   | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan  | 0,00        | 0,00         | 175.037.018,00          | 0,00                  | 0,00        | Ahmad Firdaus Kurniawan, S.Sos., M.Si.        |

|  |  |  |             |             |                           |                         |              |   |
|--|--|--|-------------|-------------|---------------------------|-------------------------|--------------|---|
| 3.1.7  | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>  | <b>Persentase pelaksanaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</b>                                | <b>8,00</b> | <b>8,00</b> | <b>915.886.432,00</b>     | <b>259.370.243,00</b>   | <b>28,32</b> | <b>Ahmad Firdaus Kurniawan, S.Sos., M.Si.</b> |
| 3.1.7.1  | Penyediaan Jasa Surat Menyurat   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | 0,00        | 0,00        | 30.034.000,00             | 0,00                    | 0,00         | Ahmad Firdaus Kurniawan, S.Sos., M.Si.        |
| 3.1.7.2  | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 1,00        | 8,33        | 181.735.120,00            | 14.721.319,00           | 8,10         | Ahmad Firdaus Kurniawan, S.Sos., M.Si.        |
| 3.1.7.3  | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 1,00        | 8,33        | 704.117.312,00            | 244.648.924,00          | 34,75        | Ahmad Firdaus Kurniawan, S.Sos., M.Si.        |
| 3.1.8  | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                       | <b>Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>367.180.999,00</b>     | <b>13.701.190,00</b>    | <b>3,73</b>  | <b>Ahmad Firdaus Kurniawan, S.Sos., M.Si.</b> |
| 3.1.8.1  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | 0,00        | 0,00        | 72.741.999,00             | 5.950.200,00            | 8,18         | Ahmad Firdaus Kurniawan, S.Sos., M.Si.        |
| 3.1.8.2  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan    | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 0,00        | 0,00        | 154.939.000,00            | 7.750.990,00            | 5,00         | Ahmad Firdaus Kurniawan, S.Sos., M.Si.        |
| 3.1.8.3  | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara   | 0,00        | 0,00        | 39.800.000,00             | 0,00                    | 0,00         | Ahmad Firdaus Kurniawan, S.Sos., M.Si.        |
| 3.1.8.4  | Pemeliharaan Aset Tak Berwujud   | Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara   | 0,00        | 0,00        | 99.700.000,00             | 0,00                    | 0,00         | Ahmad Firdaus Kurniawan, S.Sos., M.Si.        |
| <b>BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI KALIMANTAN TIMUR</b> |  |  |             |             | <b>103.447.240.000,00</b> | <b>2.637.106.955,00</b> | <b>2,55</b>  |   |


**KEPALA BADAN**  
**Drs. H. Sufian Agus, M.Si**  
**NIP. 196602041988031016**